

**TINJAUAN YURIDIS PROSES PENGANGKATAN ANAK (ADOPSI)
DI YAYASAN PEMELIHARAAN ANAK DAN BAYI (YPAB)
PERMATA HATI SURAKARTA**

NASKAH PUBLIKASI

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta



Oleh:

RATNA YULIATI
C100120104

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2016**

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN YURIDIS PROSES PENGANGKATAN ANAK (ADOPSI) DI
YAYASAN PEMELIHARAAN ANAK DAN BAYI (YPAB)
PERMATA HATI SURAKARTA**

PUBLIKASI ILMIAH

Yang ditulis oleh:

RATNA YULIATI
C100120104

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Pembimbing I



(Darsono, S.H., M.Hum.)

Pembimbing II



(Mutimatun Ni'ami, S.H., M.Hum.)

HALAMAN PENGESAHAN

TINJAUAN YURIDIS PROSES PENGANGKATAN ANAK (ADOPSI) DI YAYASAN PEMELIHARAAN ANAK DAN BAYI (YPAB) PERMATA HATI SURAKARTA

Yang ditulis oleh:

RATNA YULIATI
C100120104

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada tanggal 8 Agustus 2016
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji

Ketua : Darsono, S.H., M.Hum.

Sekretaris : Mutimatun Ni'ami, S.H., M.Hum.

Anggota : Nuswardhani, S.H., S.U.

(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum.)

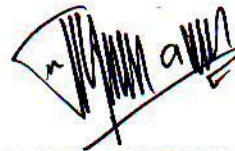
PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam makalah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 2 Agustus 2016

Yang menyatakan,



RATNA YULIATI
C100120104

**TINJAUAN YURIDIS PROSES PENGANGKATAN ANAK (ADOPTSI)
DI YAYASAN PEMELIHARAAN ANAK DAN BAYI (YPAB)
PERMATA HATI SURAKARTA**

Ratna Yuliati
C100120104
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Ratnayuli24@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pengangkatan anak (adopsi) yang dilakukan oleh calon orang tua angkat pada Yayasan Pemeliharaan Anak dan Bayi (YPAB) Permata Hati Surakarta serta akibat yang ditimbulkan setelah adanya pengangkatan anak terhadap anak yang diangkat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis sosiologis. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif. Dari hasil penelitian proses pengangkatan anak di Yayasan Pemeliharaan Anak dan Bayi (YPAB) Permata Hati Surakarta berpedoman pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/Huk/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. Kesimpulan dari penelitian ini adanya kesesuaian antara proses pengangkatan anak di Yayasan Pemeliharaan Anak dan Bayi (YPAB) Permata Hati Surakarta dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/Huk/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. Akibat hukum yang ditimbulkan setelah adanya pengangkatan anak terhadap anak yang diangkat adalah akibat hukum terhadap pewarisan dan akibat hukum terhadap perwalian.

Kata Kunci: *proses pengangkatan anak, adopsi, yayasan*

ABSTRACT

This study aims to determine the process of adoption (adoption) carried out by the prospective adoptive parents at the Child and Infant Care Foundation (YPAB) Permata Hati Surakarta and the impact after the adoption of the adopted child. The method used is the juridical law sociological research methods. This type of research is descriptive research. From the research process of adoption at the Child and Infant Care Foundation (YPAB) Permata Hati Surakarta guided by the Minister of Social Affairs Regulation No. 110/Huk/2009 on Adoption Requirements. The conclusion of this study compatibility between the process of adoption in the Child and Infant Care Foundation (YPAB) Permata Hati Surakarta with Minister of Social Affairs Regulation No. 110/Huk/2009 on Adoption Requirements. The legal consequences arising after the adoption of the adopted child is due to the inheritance law and the legal consequences of the guardianship.

Keywords: *the process of adoption, adoption, foundations*

PENDAHULUAN

Kehadiran anak dalam sebuah keluarga tidak hanya dipandang sebagai konsekuensi adanya hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan, tetapi lebih dari itu juga merupakan keinginan yang sudah melembaga sebagai naluri setiap manusia. Akan tetapi terkadang naluri ingin mempunyai anak terbentur oleh takdir Ilahi, dimana kehendak mempunyai anak tidak tercapai. Maka tak heran jika jalan pengangkatan anak (adopsi) biasanya dilakukan orang yang dalam perkawinannya tidak menghasilkan keturunan.¹ Didalam ilmu hukum kita mengenal pengangkatan anak atau adopsi (*adoptie*, *adoption*, atau *adoption*) sebagai suatu lembaga hukum, dimana dalam arti ini pengangkatan anak akibatnya bernilai yuridis.²

Peraturan yang mengatur mengenai pengangkatan anak dengan bertujuan melindungi dan mensejahterakan anak diatur diantaranya dalam: (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, (3) SEMA No. 6 Tahun 1983 sebagai pengganti SEMA No. 2 Tahun 1979 tentang Prosedur Pengangkatan Anak WNI dan WNA, (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum, maka pengangkatan anak harus melalui proses hukum, dengan adanya penetapan hakim di Pengadilan. Praktik pengangkatan anak yang dilakukan melalui pengadilan tersebut telah berkembang baik di lingkungan peradilan Negeri maupun Peradilan

¹Ahmad Azhar Basyir, 1989, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, hal. 97.

²Rusli Pandika, 2012, *Hukum Pengangkatan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika, hal.1.

Agama bagi mereka yang beragama Islam.³ Pengangkatan anak menurut Islam hanyalah boleh mengasuh anak orang lain dengan maksud ibadah kepada Allah seperti memberikan anak tersebut hak untuk mendapat pendidikan dan pengajaran serta memberikan kasih sayang penuh sama halnya dengan anak kandung tanpa memisahkan nasab dari bapak ibu kandungnya.⁴

Lembaga pengasuhan anak yang mendapatkan izin untuk melaksanakan pengangkatan anak di Surakarta adalah Yayasan Pemeliharaan Anak dan Bayi (YPAB) Permata Hati Surakarta. Berdirinya yayasan ini berawal dari keprihatinan dan kepedulian ibu-ibu terhadap kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak-anak.⁵ Adapun tujuan dan motif untuk mengangkat seorang anak adalah karna belum mempunyai anak, untuk dipakai sebagai teman untuk anak tunggal yang sudah ada, karena belas kasihan terhadap anak terlantar, miskin atau anak yatim dan sebagainya.⁶

Putusan-putusan pengadilan mengenai pengangkatan anak yang berhasil dikumpulkan dari pengadilan-pengadilan negeri seluruh Indonesia diperoleh gambaran bahwa apabila dijumlahkan, maka seluruh pengangkatan anak yang sampai pada Pengadilan Negeri (setidaknya yang disampaikan kepada Mahkamah Agung) jumlahnya lebih banyak yang berasal dari yayasan-yayasan dari pada dari orangtua kandung.⁷ Tujuan dari lembaga pengangkaktan anak antara lain adalah untuk meneruskan keturunan, manakalah di dalam suatu perkawinan tidak

³Ahmad Kamil dan Fauzan, 2008, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal.6.

⁴*Ibid.*, hal.23.

⁵*Profil Pemeliharaan Anak dan Bayi Permata Hati Surakarta*, hal.1.

⁶M.Budiharto, 1985, *Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Hukum*, Jakarta: Akademika Pressindo, hal.9-10.

⁷Sri Widoyati Wiratmo Soekito, 1983, *Anak dan Wanita dalam Hukum*, Jakarta: LP3ES, hal.39.

memperoleh keturunan.⁸ Adapun tujuan dan motif untuk mengangkat seorang anak adalah karena belum mempunyai anak, adanya harapan atau kepercayaan akan mendapatkan anak setelah mengangkat anak atau sebagai pancingan, masih ingin menambah anak dari anak yang lain jenis dari anak yang telah dipunyai, untuk dipakai sebagai teman untuk anak tunggal yang sudah ada, karena belas kasihan terhadap anak terlantar, miskin atau anak yatim dan sebagainya.⁹ Untuk menghindari praktik pengangkatan anak dengan motivasi komersial, perdagangan atau sekedar untuk pancingan dan lain sebagainya yang dianggap bertentangan dengan tujuan dari pengangkatan anak maka proses pengangkatan anak harus melalui proses yang sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana proses pengangkatan anak (adopsi) yang dilakukan oleh calon orang tua angkat pada Yayasan Pemeliharaan Anak dan Bayi (YPAB) Permata Hati Surakarta (2) Bagaimana akibat yang ditimbulkan setelah adanya perbuatan hukum pengangkatan anak terhadap anak angkat.

Tujuan penelitian ini diperlukan untuk dapat memberikan arahan bagi peneliti dalam melaksanakan penelitiannya. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Mengetahui proses pengangkatan anak (adopsi) yang dilakukan oleh calon orang tua angkat pada Yayasan Pemeliharaan Anak dan Bayi (YPAB) Permata Hati Surakarta (2) Mengetahui akibat yang ditimbulkan setelah adanya perbuatan hukum pengangkatan anak terhadap anak angkat

⁸Muderis Zaini, 1985, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta: Bina Aksara, hal.7.

⁹M.Budiharto, 1985, *Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Hukum*, Jakarta: Akademika Pressindo, hal.9-10.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data terdiri dari data primer yaitu hasil wawancara dan data sekunder yaitu data hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan wawancara kemudian dianalisis secara kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Proses Pengangkatan Anak (Adopsi) yang Dilakukan Oleh Calon Orang Tua Angkat pada Yayasan Pemeliharaan Anak dan Bayi (YPAB) “Permata Hati” Surakarta

Pengangkatan anak adalah upaya terakhir dan hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak, sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Tujuan diadakannya pengangkatan anak itu sendiri adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengangkatan anak dalam Islam hanya semata-mata peralihan tanggung jawab asuhan anak dari orang tua kandung kepada orang tua angkatnya. Menurut Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 171 huruf (h) “*Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan*”. Dari rumusan di atas, maka dapat diketahui bahwa pengangkatan anak dalam Islam memiliki tujuan yang tidak jauh berbeda dengan tujuan yang ada pada Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yaitu untuk menjamin kebutuhan si anak termasuk dalam hal pendidikan dan masa depannya.

Keberadaan prosedur pengangkatan anak dinilai menjadi hal yang sangat penting dan signifikan, melalui prosedur yang benar pengangkatan di kemudian hari diharapkan tidak menimbulkan masalah, baik bagi orang tua angkat maupun bagi anak yang diangkat. Pada pembahasan kali ini penulis akan menguraikan prosedur pengangkatan anak yang dilakukan oleh YPAB Permata Hati Surakarta. Tahap-tahap yang harus ditempuh COTA diantaranya adalah pemberkasan permohonan pengangkatan anak, *Home Visit I*, *Home Visit II*, sidang Tim PIPA (Pertimbangan Ijin Pengangkatan Anak), penetapan pengangkatan anak di Pengadilan, pencatatan kelahiran pengangkatan anak dan terakhir tahap penyampaian berkas. Langkah-langkah atau tahapan tersebut akan diuraikan secara lebih jelas sebagai berikut di bawah ini:

Proses pengangkatan anak diawali dari tahap pemberkasan permohonan pengangkatan anak. Calon orang tua angkat anak (COTA) yang hendak melakukan pengangkatan anak pada Yayasan Pemeliharaan Anak dan Bayi Permata Hati Surakarta harus mengikuti proses atau prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak yayasan. Hal ini dilakukan tidak lain adalah sebagai wujud perlindungan hak dan hak anak di masa mendatang. Langkah pertama yang dilakukan apabila hendak melakukan permohonan pengangkatan anak adalah Pemohon diwajibkan untuk datang berkonsultasi dengan pengurus bagian pengangkatan anak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Sosial RI No. 110/Huk/2009. Di sini pihak YPAB Permata Hati Surakarta akan melakukan wawancara mendasar untuk mengetahui motivasi dari COTA sekaligus psikologi dari calon orang tua angkat yang mengajukan permohonan pengangkatan anak pada Yayasan Pemeliharaan Anak dan Bayi Surakarta. Selanjutnya pihak panti akan memberikan penjelasan atau keterangan mengenai cara pengangkatan anak

dan dokumen-dokumen atau berkas-berkas apa saja yang harus dipenuhi oleh COTA.

Dokumen-dokumen atau berkas-berkas yang harus dipenuhi seperti:

(1) Surat permohonan pengasuhan dan pengangkatan anak kepada kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dan surat permohonan kepada YPAB Permata Hati Surakarta,(2) Mengganti administrasi dan mengganti perawatan calon anak angkat, foto suami istri 4x6 sebanyak 4 lembar,(3) Memenuhi seluruh syarat baik syarat material maupun syarat administratif sesuai yang tertera pada Peraturan Menteri Sosial No. 110/Huk/2009 tanggal 19 Oktober 2009,maka pemohon dianggap resmi sebagai pemohon pengangkatan anak.

Pemohon yang dianggap resmi sebagai pemohon pengangkatan anak, akan berlanjut ketahap selanjutnya yaitu tahap kunjungan pertama(*Home Visit I*).Kunjungan pertama (*Home Visit I*) yang dilaksanakan oleh petugas dari YPAB dengan petugas Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Surakarta untuk mengetahui tingkat kelayakan dari sisi ekonomi pemohon pengangkatan anak.Setelah dilakukan kunjungan pertama (*Home Visit I*) dan kunjungan tersebut memenuhi persyaratan, maka akan dikeluarkan Laporan Sosial Calon Anak Angkat (Lapsos CAA) dan Laporan Sosial Calon Orang Tua Angkat(Lapsos COTA). Kedua laporan tersebut kemudian akan dimintakan Surat Keterangan Pengasuhan kepada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.¹⁰ Apabila Surat Keterangan Pengasuhan Anak sudah turun akan dilakukan serah terima dan asuhan keluarga terhadap bayi yang akan diadopsi dengan tiga perjanjian yaitu

¹⁰Ira dan Rahning Untari Nugroho, Pengurus Yayasan Pemeliharaan Anak dan Bayi (YPAB) Permata Hati Surakarta, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, Jumat, 26 November 2015 dan Senin, 21 Desember 2015,pukul 12.30.

perjanjian penyerahan anak kepada COTA, perjanjian penyerahan anak sementara dan perjanjian asuhan keluarga.

Tahap kunjungan II (*Home Visit II*). Setelah kunjungan pertama selesai, akan diadakan kunjungan kedua (*Home Visit II*) yang dilakukan dalam asuhan kurang lebih selama 6(enam) bulan, pada kunjungan kedua ini anak akan dilihat perkembangannya, apabila anak dalam kondisi perawatan yang baik, maka akan diterbitkan Laporan Sosial Pengembangan Anak. Akan tetapi apabila pemohon pengangkatan anak tersebut terbukti melalaikan kewajibannya yang menyebabkan anak yang dalam asuhannya tidak terawat dengan baik, maka anak tersebut akan dikembalikan kepada Yayasan Pemeliharaan Anak dan Bayi Permata Hati Surakarta.

Tahap sidang tim PIPA (Pertimbangan Ijin Pengangkatan Anak). Berdasarkan Laporan Sosial Pengembangan Anak tersebut dimintakan ke Dinas Sosial Provinsi untuk diajukan kepada Tim PIPA (Pertimbangan Ijin Pengangkatan Anak). Sidang TIM PIPA ini setiap tahunnya dilakukan selama 3 (tiga) periode yaitu pada bulan Maret, Juli dan Oktober, di dalam sidang TIM PIPA ini akan dilakukan sidang terkait berkas-berkas permohonan pengangkatan anak yang dihadiri oleh anggota TIM PIPA Daerah, yang meliputi Dinas Kesehatan, Kanwil Agama, Kanwil Hukum dan HAM, Catatan Sipil, Kepolisian, Panti/Yayasan, dan lain-lain.¹¹ Sidang Tim PIPA ini dilaksanakan dengan maksud untuk menentukan apakah proses pengangkatan anak disetujui oleh tim atau tidak.

Sidang Tim PIPA ini dilaksanakan dengan maksud untuk menentukan apakah proses pengangkatan anak disetujui oleh tim atau tidak. Tugas anggota Tim

¹¹Ira dan Rahning Untari Nugroho, Pengurus Yayasan Pemeliharaan Anak dan Bayi (YPAB) Permata Hati Surakarta, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, Jumat, 26 November 2015 dan Senin, 21 Desember 2015, pukul 12.30.

PIPA tersebut telah disebutkan secara rinci pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 37/Huk/2010 tentang Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Pusat. Kemudian setelah dilakukan sidang Tim PIPA akan turun Surat Keputusan Pengangkatan Anak yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya Surat Keputusan Pengangkatan Anak tersebut akan diajukan oleh COTA yang bersangkutan ke Pengadilan Negeri Surakarta.

Tahap penetapan pengangkatan anak di Pengadilan. Berdasarkan permohonan proses pengangkatan anak yang dilakukan oleh COTA yang bersangkutan kepada Pengadilan Negeri Surakarta, maka akan diadakan sidang pengesahan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Surakarta untuk mendapatkan penetapan sebagai anak angkat sah.¹² Kemudian setelah sidang penetapan selesai dan anak angkat dinyatakan sah sebagai anak angkat dari calon orangtua angkat yang bersangkutan, tahap selanjutnya adalah pencatatan kelahiran pengangkatan anak. Pencatatan kelahiran pengangkatan anak dilakukan setelah dikeluarkannya Penetapan Pengadilan di Dinas Kependudukan Catatan Sipil. COTA harus datang ke Instansi Sosial Propinsi dan Panti/Yayasan untuk dilakukannya pencatatan data. Pencatatan data akta kelahiran anak angkat dilakukan oleh COTA yang bersangkutan dibantu oleh pihak yayasan.¹³

COTA (Calon Orang Tua Angkat) dalam melakukan pengangkatan anak melaporkan pengangkatan anak tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta paling lambat 30 hari sejak diterimanya penetapan Pengadilan. Kemudian memerintahkan kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan

¹²Rahning Untari Nugroho, Sekertaris I Yayasan Pemeliharaan Anak dan Bayi (YPAB) Surakarta, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, Senin, 21 Desember 2015, pukul 13.20.

¹³Ira dan Rahning Untari Nugroho, Pengurus Yayasan Pemeliharaan Anak dan Bayi (YPAB) Permata Hati Surakarta, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, Jumat, 26 November 2015 dan Senin, 21 Desember 2015, pukul 12.30.

Catatan Sipil Kota Surakarta untuk membuatterakhir, pihak panti akan membantu COTA untuk penyampaian berkas kembali. Berkas berkas tersebut dirangkap 3(tiga) untuk Dinas Sosial Provinsi, Pengadilan Negeri Surakarta dan Lembaga catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran tersebut.

Akibat yang Ditimbulkan Setelah Adanya Perbuatan Hukum Pengangkatan Anak Terhadap Anak yang Diangkat

Tujuan pengangkatan anak yang diutarakan oleh David M. Brodzinsky seorang Profesor Psikologi University New Brunswick mengungkapkan “*There is always debate about how to assess children’s interests, and many of those who oppose international adoption do so in the name of children’s interests. However adoption advocates make powerful arguments that children’s most fundamental interests are in being raised in a loving, nurturing manner, in the context of a permanent family, and that these interests can best be served by giving them the homes that often will only be available in international adoption.*”¹⁴ Berdasarkan penjelasan di atas dapat dilihat bahwa pengangkatan anak baik di luar negeri maupun dalam negeri semakin kuat dipandang dari sisi kepentingan yang terbaik si anak sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan anak dan untuk memperbaiki kehidupan dan masa depan si anak angkat.

KUH Perdata tidak mengatur mengenai anak adopsi atau anak angkat. Pengaturan mengenai anak angkat hanya dapat ditemukan di dalam *Staatsblad* Tahun 1917 Nomor 129 Tahun 1917 yang menjadi pelengkap dari KUH Perdata, karena di dalam KUH Perdata tidak ada aturan yang mengatur mengenai anak angkat, maka lahirnya *Staatsblad* tersebut adalah untuk melengkapi kekosongan

¹⁴ David M. Brodzinsky, 1993, *Long-term Out Comes In Adoptions*, Spring, Vol.3 No.1, hal.162.

hukum yang mengatur dalam ketentuan *Staatsblad* tersebut adalah hanya berlaku bagi masyarakat Tionghoa.¹⁵ Sebagai mana diatur dalam *Staatblaad* 1917 Nomor 129 akibat hukum pengangkatan anak adalah anak tersebut secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat dan dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat serta menjadi ahli waris orang tua angkat, artinya akibat pengangkatan anak tersebut memutuskan hubungan antara orang tua kandung dengan anak tersebut atau dengan kata lain kedudukan antara anak kandung dengan anak angkat adalah sama, termasuk pada pembagian warisan harta orang tua angkatnya apabila meninggal dunia. Ketentuan tersebut terdapat pada *Staatsblad* Nomor 129 Tahun 1917 yang menjadi pelengkap dari KUH Perdata, karena di dalam KUH Perdata tidak ada aturan yang mengatur mengenai anak angkat.

Pengangkatan anak merupakan perbuatan hukum, oleh sebab itu dengan adanya perbuatan pengangkatan anak ini akan diikuti dengan timbulnya akibat hukum, baik itu dari segi hukum barat, hukum adat maupun hukum Islam. Penulis dalam hal ini akan membahas akibat hukum pengangkatan anak dipandang dari segi hukum Islam. Berikut ini adalah akibat-akibat hukum yang ditimbulkan oleh adanya perbuatan hukum pengangkatan anak terhadap anak yang diangkat berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis bersama dengan narasumber Ibu Rahning Untari Nugroho Selaku Sekertaris I pada Yayasan Pemeliharaan Anak dan Bayi (YPAB) Permata Hati Surakarta, beliau mengatakan bahwa

¹⁵Sintiar Rahmaningsih, 2015, "Kedudukan Anak Angkat Dalam Pembagian Warisan (Kajian Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam)", *Jurnal Ilmiah*, Mataram: Universitas Mataram, hal. 10.

pengangkatan anak akan menimbulkan 2 (dua) akibat, yaitu: (1) Akibat hukum dalam hal pewarisan dan (2) akibat hukum terhadap perwalian.

Akibat hukum yang ditimbulkan dari pengangkatan anak pada YPAB Permata Hati Surakarta salah satunya dalam hal pewarisan beliau mengatakan bahwa Anak angkat tidak berhak atas warisan dari harta orang tua angkatnya, anak tersebut hanya diperbolehkan menerima hibah dari orang tua angkatnya.¹⁶ Pengangkatan anak yang dilakukan oleh Yayasan Pemeliharaan Anak dan Bayi (YPAB) Permata Hati Surakarta sudah sesuai dengan ajaran Islam. Pengangkatan anak pada YPAB Permata Hati Surakarta tidak menimbulkan akibat hukum bagi anak angkat dengan orang tua angkatnya kecuali dalam hal mensejahterakan anak tersebut. Akibat hukum pengangkatan yang didapat berdasarkan wawancara dengan Ibu Rahning Untari Nugroho bahwa anak angkat tidak berhak mewarisi harta orang tua angkatnya, hal ini dikarenakan nasab tidak akan pernah bisa dihapuskan dan tidak pula bisa diputuskan, anak angkat tidak memiliki hubungan nasab dengan orang tua angkatnya dia hanya memiliki hubungan nasab dengan orang tua kandungnya.

Pembagian harta warisan yang diperuntungkan bagi anak angkat adalah sebanyak 1/3 bagian dari harta orang tua angkatnya, hal ini secara tegas diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 ayat (1) dan (2) yang berbunyi sebagai berikut: (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal-Pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima *wasiat wajibah* diberi wasiat wajibah sebanyak banyaknya 1/3

¹⁶Rahning Untari Nugroho, Sekertaris I Yayasan Pemeliharaan Anak dan Bayi (YPAB) Surakarta, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, Senin, 21 Desember 2015, pukul 13.35.

dari harta warisan anak angkat. (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah, sebanyak banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

Akibat hukum terhadap perwalian ini merupakan akibat hukum yang diperuntukkan bagi anak angkat yang berjenis kelamin perempuan yang menyatakan bahwa orang tua angkat tidak berhak menjadi wali nikah anak angkat perempuannya.¹⁷ Hubungan keperdataan antara anak yang akan diangkat dengan orang tua kandungnya masih terjaga dengan baik, hal ini dapat dilihat dari aspek persyaratan yang menjadi tolak ukur penilaian pengangkatan anak di yayasan tersebut. Dalam persyaratan yang berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/Huk/2009 disebutkan salah satunya bahwa calon orang tua angkat (COTA) harus membuat Surat pernyataan bahwa COTA akan memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak tersebut.

PENUTUP

Kesimpulan

Pertama, proses pengangkatan anak yang dilakukan oleh Yayasan Pemeliharaan Anak dan Bayi (YPAB) Permata Hati Surakarta sampai saat ini dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/Huk/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. Pertama COTA diwajibkan datang ke YPAB Permata Hati Surakarta berkonsultasi dan akan dilakukan wawancara mendasar oleh petugas bagian pengangkatan anak. Selanjutnya, pemberkasan permohonan pengangkatan anak yang terdiri dari surat permohonan pengasuhan pengangkatan

¹⁷Rahning Untari Nugroho, Sekertaris I Yayasan Pemeliharaan Anak dan Bayi (YPAB) Surakarta, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, Senin, 21 Desember 2015, pukul 13.35.

anak yang ditujukan kepada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Surat Permohonan yang ditujukan untuk YPAB Permata Hati Surakarta, mengganti biaya administrasi perawatan anak dan memenuhi seluruh syarat material maupun administrative sesuai Peraturan Menteri Sosial No.110/Huk/2009. Kemudian akan dilakukan *Home Visit* I dan *Home Visit* II. Setelah kunjungan pertama dan kedua tahap selanjutnya akan diadakan sidang Tim PIPA (Pertimbangan Ijin Pengangkatan Anak) untuk memeriksa berkas permohonan pengangkatan anak. Setelah dilakukan sidang Tim PIPA langkah selanjutnya adalah penetapan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Surakarta. Berdasarkan penetapan Pengadilan tersebut COTA berkewajiban untuk melakukan pencatatan kelahiran pengangkatan anak di Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan terakhir adalah tahap penyampaian berkas ke Dinas Sosial Provinsi, Pengadilan Negeri Surakarta dan YPAB Permata Hati Surakarta.

Kedua, akibat-akibat hukum yang ditimbulkan oleh adanya perbuatan hukum pengangkatan anak terhadap anak yang diangkat berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis bersama dengan narasumber Ibu Rahning Untari Nugroho selaku Sekertaris I pada Yayasan Pemeliharaan Anak dan Bayi (YPAB) Permata Hati Surakarta, beliau mengatakan bahwa pengangkatan anak akan menimbulkan 2 (dua) akibat, yaitu akibat hukum dalam hal pewarisan yaitu anak angkat tidak berhak mendapatkan harta warisan dari orangtua angkatnya, akan tetapi anak angkat berhak untuk memperoleh hibah dari orangtua angkatnya dan akibat hukum terhadap perwalian yaitu anak angkat perempuan tidak berhak menjadikan ayah angkatnya untuk menjadi wali nikahnya dikemudian hari.

Saran

Pertama, bagi masyarakat, hendaknya dalam melakukan pengangkatan anak, baik pengangkatan anak secara langsung maupun tidak langsung sebaiknya melakukan pengangkatan anak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Kemudian bagi yang ingin mengadopsi anak lebih baiknya memiliki motivasi yang tidak semata mata hanya karna di dalam sebuah keluarga belum di karunia seorang anak, namun di sini calon orang tua angkat diharapkan lebih memiliki kesadaran dalam hal membantu anak anak balita terlantar agar terjamin kehidupannya di kemudian hari.

Kedua, bagi Yayasan Pemeliharaan Anak dan Bayi (YPAB) Permata Hati, agar pelaksanaan pengangkatan anak agar lebih terjamin, alangkah baiknya pihak Yayasan Pemeliharaan Anak dan Bayi “Permata Hati” Surakarta menambah dokumen bagi Calon Orang Tua Angkat (COTA) yang beragama Islam (Muslim), dua (2) dokumen tambahan itu diantaranya adalah surat pernyataan tidak akan menjadi wali apabila anak angkatnya akan menikah dan surat pernyataan akan memberikan hibah kepada anak angkatnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- AzharBasyir, Ahmad.1989. *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta:Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Basyir, Ahmad Azhar. 1972. *Kawin Campur, Adosi, Wasiat Menurut Islam*, Bandung: Alma'arif.
- Budiharto, M. 1985. *Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Hukum*, Jakarta: Akademika Pressindo.
- Pandika, Rusli. 2012. *Hukum Pengangkatan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Widyowati, Sri. 1983. *Anak dan Wanita dalam Hukum*, Jakarta: LP3ES.
- Zaini, Muderis. 1985. *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta: Bina Aksara.

Aturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama.

Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/Huk/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

Jurnal

David M. Brodzinsky, 1993, *Long-term Out Comes In Adoptions*, Spring 1993, Vol.3 No.1.

Mitra Suprayudi, 2013, *Analisis Hukum Terhadap Tabanni (Pengangkatan Anak) menurut Fikih Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Januari 2013, Vol.4 No.1